

KONTRIBUSI INDUSTRI SAWIT PADA SDGs : PENGHAPUSAN KEMISKINAN (SDGs-1)

Oleh
Tim Riset PASPI

ABSTRAK

Paradigma keberlanjutan (sustainability) berkembang menjadi paradigma global dengan disetujuinya platform Sustainable Development Goals (SDGs) 2016-2030 oleh negara – negara anggota PBB pada tahun 2015. Melalui platform SDGs 2016-2030 ini, negara – negara di dunia sepakat untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai 17 tujuan yang salah satunya adalah Penghapusan Kemiskinan (SDGs-1). Indonesia yang menjadi salah satu anggota PBB dan bagian dari masyarakat global berkewajiban menerapkan platform SDGs sebagai arah pembangunan nasional. Implementasi SDGs di Indonesia dapat didukung dengan keberadaan industri sawit yang merupakan industri strategis nasional. Industri sawit sebagai industri strategis Indonesia dapat diposisikan sebagai bagian dari solusi pencapaian tujuan SDGs pertama yaitu penghapusan kemiskinan (SDGs – 1). Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit di daerah pedesaan yang tersebar di 25 provinsi dan 200 kabupaten, sehingga berkontribusi pada pembangunan daerah tersebut dengan menciptakan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan petani, pengurangan kemiskinan, serta adanya efek-multiplier-nya terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya dipedesaan dan perkotaan.

Keywords : bukti empiris, implementasi SDGs, industri sawit, paradigma keberlanjutan

PENDAHULUAN

Istilah Keberlanjutan (*Sustainability*) sudah tidak asing lagi pada masa sekarang. Berbagai forum nasional dan internasional mengangkat isu *sustainability* sebagai topik diskusi terkait penerapannya dalam berbagai bidang terutama sektor pertanian. Isu ini muncul seiring dengan semakin kuatnya perhatian terhadap kondisi lingkungan yang diusung penganut paradigma *environmentalist* yang menganggap pembangunan dengan mengeksploitasi alam bukanlah jalan menuju kesejahteraan manusia. Pandangan ini bertentangan paradigma *developmentalist* yang menganggap sumberdaya alam harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan manusia.

Kemudian berkembanglah konsep *sustainability* sebagai paradigma baru yang mengakomodir pandangan tentang pemanfaatan sumberdaya alam baik dari paradigma *environmentalist* maupun paradigma *developmentalist*. Melalui paradigma ini, sumberdaya alam dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial serta kelestarian lingkungan tetap dapat dipertahankan. Paradigma *sustainability* ini menjadi harmoni aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari suatu pembangunan, dan sering disebut dengan 3-P yaitu *Profit* (aspek ekonomi), *People* (aspek sosial) dan *Planet* (aspek lingkungan).

Paradigma keberlanjutan (*sustainability*) ini kemudian berkembang menjadi paradigma global dengan disetujuinya *platform Sustainable Development Goals* (SDGs) 2016-2030 oleh negara – negara anggota PBB pada tahun 2015. Platform baru tersebut yang ditandatangani oleh 193 negara anggota PBB termasuk Indonesia, merupakan kelanjutan dari platform pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang menjadi pemandu pembangunan global 2000-2015. *Platform Sustainable Development Goals* (SDGs) 2016-2030 menjadi paradigma pembangunan global untuk mencapai 17 tujuan yang salah satunya adalah *Penghapusan Kemiskinan* (SDGs-1). Penghapusan kemiskinan ini ditempatkan

sebagai tujuan pertama SDGs menunjukkan betapa pentingnya suatu pembangunan memberikan pengaruh pada penurunan angka kemiskinan terutama di negara – negara berkembang seperti Indonesia.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang turut serta menyetujui SDGs harus mengimplementasikan *platform* SDGs dalam pembangunan nasional di berbagai level. Industri strategis di Indonesia seperti industri minyak sawit dapat diposisikan sebagai bagian dari solusi melalui kontribusinya pada pencapaian tujuan – tujuan SDGs terutama penghapusan kemiskinan.

Tulisan ini akan mendiskusikan perkembangan paradigma *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2016 – 2030 dan bukti empiris kontribusi industri minyak sawit Indonesia pada pencapaian tujuan SDGs yaitu penghapusan kemiskinan.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) SEBAGAI PARADIGMA BARU

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan platform pembangunan dunia yang diresmikan oleh 193 negara anggota PBB termasuk Indonesia pada tahun 2015. Platform ini akan diberlakukan selama 15 tahun yaitu pada periode tahun 2016 hingga tahun 2030. SDGs merupakan kelanjutan dari platform pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang menjadi pemandu pembangunan global 2000-2015. Kedua platform ini memiliki perbedaan dimana MDGs memiliki *driver* utama yaitu pemerintah, sedangkan SDGs yang dikenal sebagai *sharing economy*, digerakkan sinergitas global (*global partnership*), sinergitas nasional (kebijakan pemerintah dengan industri/daerah), sinergitas daerah (sinergitas dunia usaha dengan masyarakat) dan kreatifitas perusahaan.

Melalui *platform* SDGs 2016-2030 ini, negara – negara di dunia sepakat untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai 17 tujuan sebagai berikut : (1) *Penghapusan Kemiskinan* (SDGs-1), (2) *Penghapusan Kelaparan, Perbaikan Gizi dan Pertanian Berkelanjutan* (SDGs-2), (3) *Hidup Sehat*

Untuk Semua (SDGs-3), (4) Pendidikan Berkualitas dan Inklusif (SDGs-4), (5) Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (SDGs-5), (6) Ketersediaan Air Bersih secara Berkelanjutan (SDGs-6), (7) Ketersediaan Energi Secara Berkelanjutan (SDGs-7), (8) Pertumbuhan ekonomi dan Kesempatan Kerja Inklusif (SDGs-8), (9) Pembangunan Infrastruktur, Industrialisasi dan Inovasi (SDGs-9), (10) Pengurangan Ketimpangan (SDGs-10), (11) Perkotaan dan Pemukiman penduduk yang aman, inklusif dan berkelanjutan (SDGs-11), (12) Produksi dan pola Konsumsi Berkelanjutan (SDGs-12), (13) Pencegahan Perubahan Iklim dan dampaknya (SDGs-13), (14) Konservasi Sumberdaya Perairan secara Berkelanjutan (SDGs-14), (15) Pengelolaan Biodiversity, ekosistem daratan dan hutan secara berkelanjutan (SDGs-15), (16) Perdamaian, Keadilan dan Penguatan Kelembagaan yang efektif dan inklusif (SDGs-16), dan (17) Kerja sama Global mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs-17).

Sejak diresmikannya pada tahun 2015, platform SDGs ini mulai banyak diangkat sebagai topik diskusi terkait implementasinya baik di forum nasional maupun forum internasional. Platform SDGs ini terbentuk sebagai paradigma pembangunan global berawal dari semakin kuatnya perhatian terhadap kondisi lingkungan yang diusung penganut paradigma *environmentalist* yang menganggap pembangunan dengan mengeksploitasi alam bukanlah jalan menuju kesejahteraan manusia. Pandangan ini bertentangan paradigma *developmentalist* yang menganggap sumberdaya alam harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan manusia. Paradigma *developmentalist* ini menjadi paradigma pembangunan global sejak revolusi industri pertama (*industry Revolution 1.0*) tahun 1784 dan kemudian disusul revolusi pertanian (*green revolution 1.0*) tahun 1950-an hingga saat ini.

Kemudian berkembanglah konsep keberlanjutan (*sustainability*) sebagai paradigma baru yang mengakomodir pandangan terkait pemanfaatan sumberdaya alam baik dari paradigma *environmentalist* maupun paradigma *developmentalist*.

Melalui paradigma ini, sumberdaya alam dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial serta kelestarian lingkungan tetap dapat dipertahankan. Paradigma keberlanjutan (*sustainability*) ini menjadi harmoni aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari suatu pembangunan, dan sering disebut dengan 3-P yaitu *Profit* (aspek ekonomi), *People* (aspek sosial) dan *Planet* (aspek lingkungan).

Harmoni 3-P pada paradigma *sustainability* dimuat dalam 17 tujuan SDGs yang diharapkan dapat tercapai secara inklusif hingga tahun 2030. Inklusifitas ini merupakan penekanan baru dari SDGs dimana setiap aspek atau prinsip/kriteria dinilai secara menyeluruh berupa dampak positif dan negatif suatu pembangunan terhadap daerah dan masyarakat. Inklusifitas ini tidak hanya diukur pada level perusahaan seperti pencapaian laba, tetapi juga diukur dampak kehadiran aktifitas perusahaan baik dari segi input yang digunakan maupun output yang dihasilkan bagi ekonomi, sosial dan lingkungan lokal, regional, nasional bahkan internasional. Dampak pembangunan tersebut dapat berupa dampak positif (*economic externality*) maupun dampak positif (*diseconomic externality*), sehingga dalam mewujudkan SDGs dunia tantangannya adalah bagaimana memaksimalkan dampak positif dan sekaligus meminimumkan dampak negatifnya.

Oleh sebab itu, upaya mewujudkan tujuan-tujuan SDGs tersebut secara inklusif membutuhkan sinergitas kebijakan pemerintah dengan kegiatan/kreatifitas dunia usaha pada setiap level (perusahaan, lokal, regional, nasional maupun internasional (*global partnership*)). Sehingga implementasi platform SDGs tidak hanya mengandung aspek 3-P tetapi menjadi 4-P yakni *Politics* (P ke 4) yakni kebijakan pemerintah setiap level maupun kebijakan internasional. Kepentingan nasional (*national interest*) atau kebijakan spesifik suatu negara akan mempengaruhi pencapaian 17 tujuan SDGs 2016 – 2030.

KONTRIBUSI INDUSTRI SAWIT TERHADAP PENGHAPUSAN KEMISKINAN (SDGs - 1)

Indonesia yang menjadi salah satu anggota PBB dan bagian dari masyarakat global berkewajiban menerapkan *platform* SDGs sebagai arah pembangunan nasional. Indonesia melalui Kementerian – Kementerian terkait saat ini menyusun berbagai kebijakan yang diperlukan dalam implementasi SDGs di Indonesia. Kebijakan pemerintah (*politics*) merupakan salah satu pilar penting dalam implementasi SDGs baik berupa kebijakan fiskal, kebijakan moneter maupun penguatan sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan – tujuan SDGs.

Implementasi SDGs di Indonesia dapat didukung dengan keberadaan industri sawit yang merupakan industri strategis nasional. Keberadaan industri sawit telah terbukti banyak memberi dampak positif bagi Indonesia secara ekonomi dan sosial. Perkebunan kelapa sawit terletak di daerah pedesaan yang tersebar di 25 provinsi dan 200 kabupaten, sehingga berkontribusi pada pembangunan daerah tersebut dengan menciptakan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan petani, pengurangan kemiskinan, serta adanya efek-multiplier terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya di pedesaan dan perkotaan (World Growth 2011, PASPI 2014). Hal ini sejalan dengan pencapaian tujuan SDGs berupa *Penghapusan kemiskinan*.

Berbagai kajian empiris telah menunjukkan bukti bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit di daerah – daerah pedesaan memberikan manfaat yang nyata pada perekonomian pedesaan. Supriadi (2013) menyatakan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi sehingga daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit. Perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di

wilayah ini dengan tumbuhnya perdagangan dan jasa.

Komoditas kelapa sawit yang semakin prospektif dibanding komoditas perkebunan lainnya menyebabkan banyak petani di pedesaan yang mengkonversi kebun miliknya menjadi kebun kelapa sawit. Konversi ini mengakibatkan peningkatan pendapatan petani sehingga mengurangi kemiskinan di pedesaan. Hal ini terkonfirmasi dari hasil penelitian Utami *et al.* (2017) yang melakukan penelitian di Desa Penyabungan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa petani melakukan konversi sebagian maupun seluruh kebun karet menjadi kebun kelapa sawit. Konversi tersebut menghasilkan peningkatan pendapatan petani sebesar 33,42 persen.

Siradjuddin (2015) menjelaskan bahwa petani menanam kelapa sawit karena beberapa alasan diantaranya alasan pemasaran yang lebih mudah, keperluan sarana produksi yang mudah diperoleh, perusahaan kelapa sawit yang mudah, serta harga jual dan pendapatan petani yang tinggi. Hasil pendapatan usahatani kelapa sawit diprioritaskan petani untuk pendidikan anak, perluasan dan perbaikan rumah, pembelian kendaraan bermotor, dan perluasan kebun sawitnya.

Kontribusi industri sawit dalam pencapaian tujuan SDGs yaitu penghapusan kemiskinan semakin dikuatkan dengan hasil penelitian Syahza (2011) di Provinsi Riau yang merupakan daerah dengan produksi minyak sawit terbesar di Indonesia. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Daerah Riau memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di daerah pedesaan. Tingkat pertumbuhan indeks kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 1995 sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan meningkat sebesar 49 persen. Tahun 2003 indeks pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit meningkat menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan angka *multiplier effect* sebesar 2,48, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha (Syahza 2004). Hal ini menjadi bukti pembangunan

perkebunan kelapa sawit telah memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Riau sehingga berkontribusi dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan.

Kontribusi industri sawit dalam penghapusan kemiskinan tidak hanya dari subsistem budidaya atau perkebunan kelapa sawit, namun juga dari subsistem agribisnis hilirnya. Salah satu agribisnis hilir kelapa sawit yang saat ini sedang fokus dikembangkan Indonesia adalah biodiesel berbahan baku minyak sawit dengan adanya kebijakan mandatori biodiesel dan perluasan penerapannya untuk sektor non-PSO sejak awal September 2018. Menurut Susila & Munadi (2008), pengembangan biodiesel berdampak pada pengurangan jumlah orang miskin, walau pengurangan tersebut relatif kecil. Pengembangan biodiesel berbahan baku minyak sawit akan mengurangi kemiskinan di daerah perkebunan antara 23.000 – 60.000 (0,059% - 0,16%).

Bukti – bukti empiris manfaat ekonomi dan sosial dari industri sawit Indonesia menjadi bukti bahwa industri sawit dapat diposisikan sebagai bagian dari solusi pencapaian tujuan SDGs yang pertama yaitu penghapusan kemiskinan. Memosisikan industri sawit sebagai aktor SDGs selain secara *built-in* dapat menghadirkan solusi, juga dapat memperkuat industri sawit itu sendiri. Platform SDGs sebagai norma global (*global value*) baru, yang diakui secara internasional, perlu dimanfaatkan industri sawit sebagai upaya meningkatkan keberterimaan industri sawit secara internasional melalui kontribusinya pada SDGs.

KESIMPULAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan platform pembangunan dunia yang diresmikan oleh 193 negara anggota PBB termasuk Indonesia pada tahun 2015. Platform SDGs ini terbentuk sebagai paradigma baru pembangunan global yang mengakomodir pandangan terkait pemanfaatan sumberdaya alam baik dari paradigma *environmentalist* maupun paradigma *developmentalist*. Melalui

paradigma ini, sumberdaya alam dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial serta kelestarian lingkungan tetap dapat dipertahankan. Paradigma keberlanjutan (*sustainability*) ini menjadi harmoni aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari suatu pembangunan, dan sering disebut dengan 3-P yaitu *Profit* (aspek ekonomi), *People* (aspek sosial) dan *Planet* (aspek lingkungan).

Industri sawit sebagai industri strategis Indonesia dapat diposisikan sebagai bagian dari solusi pencapaian tujuan SDGs pertama yaitu penghapusan kemiskinan (SDGs – 1). Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit di daerah pedesaan yang tersebar di 25 provinsi dan 200 kabupaten, sehingga berkontribusi pada pembangunan daerah tersebut dengan menciptakan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan petani, pengurangan kemiskinan, serta adanya efek-multiplier terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya dipedesaan dan perkotaan. Memosisikan industri sawit sebagai aktor SDGs selain secara *built-in* dapat meningkatkan keberterimaan industri sawit secara internasional karena kontribusinya pada SDGs yang telah diakui sebagai norma global (*global value*) baru.

DAFTAR PUSTAKA

- PASPI. 2014. *Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan : Peranan Industri Minyak Sawit dalam Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Pedesaan, Pengurangan Kemiskinan dan Pelestarian Lingkungan*. Bogor.
- Siradjuddin I. 2015. Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Agroteknologi*. 5(2): 7 – 14.
- Supriadi W. 2013. Perkebunan Kelapa Sawit Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sambas. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*. 1(1): 1 – 15.
- Susila WR, Munadi E. 2008. Dampak Pengembangan Biodiesel Berbasis CPO

- Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Infomatika Pertanian*. 17 (2): 1173 - 1194.
- Syahza A. 2004. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit Di Daerah Riau. *Jurnal Sosiohumaniora*. 6(3): 217 - 231.
- Syahza A. 2011. Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 12(2): 297 - 310.
- Utami R, Putri EIK, Ekayani M. 2017. Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus: Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPi)*. 22(2): 115 - 126.
- World Growth. 2011: *The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia*. World Growth.